

BAB III

SEJARAH PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (PRD)

A. Terbentuknya Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Sejarah PRD pada esensinya adalah sejarah pembangunan dan pengembangan perlawanan terhadap semua bentuk tata cara penindasan terhadap masyarakat dalam bentuk apapun. Dari pengalaman membangun aktivitas komite-komite aksi di akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an, hingga dikembangkan menjadi persatuan hingga partai pada tahun 1994-1996. Dari pengalaman tersebut PRD memandang bahwa kekuatan rakyat yang berkesadaran demokratik dan terorganisir dalam wadah-wadahnya yang merdeka serta mandiri merupakan satu-satunya kekuatan yang berkemampuan membebaskan penindasan terhadap masyarakat dalam bentuk apapun.

Partai Rakyat Demokratik (PRD) merupakan salah satu partai yang berbeda dengan partai-partai lain selama sejarah pemerintahan Orde Baru. Partai ini banyak mengalami berbagai bentuk represi dan penindasan, baik secara fisik maupun mental oleh alat-alat kekuasaan pemerintah Orde Baru. Perlakuan-perlakuan seperti Intimidari, pengejaran, penculikan dan pemenjaraan diterima PRD, melebihi perlakuan Orde Baru terhadap partai-partai lainnya.

Hal lain yang membuat PRD menjadi beda yaitu kepemimpinan kaum muda dalam partai tersebut yang berjuang secara politis diluar pengertian,

tata cara, dan perangkat-perangkat politik pemerintah Orde Baru yang dianggap kolusif, nepotis, dan represif. Kaum muda yang konsistensif dalam berbagai macam tindakan resistensif/perlawanan terhadap segala bentuk politik Orde Baru secara terbuka dan terang-terangan ataupun terpaksa dengan cara praktik bawah tanah, yang kemudian dilarang oleh pemerintah dan dianggap *subversif*.

Secara kronologis mengenai proses sejarah terbentuknya Persatuan Rakyat Demokratik hingga menjadi Partai Rakyat Demokratik (PRD) dapat terbagi-bagi dalam beberapa fase, dimana dalam setiap fase merupakan suatu kelanjutan sejarah yang tak pernah terputus satu sama lainnya. Secara lebih rinci, akan dijelaskan di bawah mengenai fase-fase yang merupakan sejarah PRD tersebut adalah sebagai berikut.¹

Telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa gerakan mahasiswa pada tahun 1990-an memiliki karakteristik yang berbeda dengan gerakan mahasiswa pada era-era sebelumnya. Para aktivis mahasiswa pada era ini sudah membentuk kelompok gerakan mahasiswa yang dikenal dengan komite-komite aksi. Beberapa kelompok gerakan mahasiswa dari berbagai komite aksi tersebut memandang dan menyadari bahwa sudah saatnya gerakan mahasiswa menyatukan diri dengan rakyat yang sudah bangkit. Advokasi yang dilakukan mereka berupa turun ke bawah, yakni bekerja sama dengan dan mendampingi kaum buruh dan tani yang merupakan golongan masyarakat yang sering mengalami praktek-praktek penindasan oleh

¹ Sumber utama dalam penulisan sejarah PRD ini diambil dari buku, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, yang diterbitkan oleh KPP-PRD, 1999.

pemerintah Orde Baru. Fenomena aktivitas inilah yang pada akhirnya menjadi embrio bagi lahirnya gerakan massa yang dikenal dengan Partai Rakyat Demokratik.

1. Pengorganisir Kekuatan Perlawanan

Setelah melakukan berbagai bentuk organisir dan aksi advokasi, dari berbagai kekuatan resistensi Orde Baru antar wilayah dan lintas sektoral, maka mengenai sejarah terbentuknya PRD adalah dengan penyatuan semua organisasi menjadi satu wadah perjuangan bersama. Para aktivis SMID yang sudah bergerak secara sembunyi-sembunyi memandang perlu adanya kesatuan gerakan oposisi yang terorganisir secara sistematis dan ideologis, jadi bukan semata-mata organisasi yang bersifat lokal dan sporadis. Semua hasil kerja melalui aksi-aksi dan propaganda dipanen dan dilumbungkan ke dalam suatu organisasi-organisasi sektoral yang terbuka. Beberapa organisasi yang kemudian berhasil dipadukan para aktivis mahasiswa tersebut antara lain :²

1. Pembentukan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) itu sendiri. Selama ini secara sembunyi-sembunyi SMID didirikan, dan bagi mereka sudah saatnya SMID harus dipublikasikan secara formal dan luas sebagai suatu organisasi mahasiswa yang secara terang-terangan menentang Orde Baru. Hal tersebut dikarenakan bahwa SMID dalam program-program

² *ibid.*, h. 18.

politiknya secara tegas menyerang fondasi politik pemerintahan Orde Baru seperti menuntut penghapusan paket 5 UU Politik 1985 dan pencabutan Dwi Fungsi ABRI.

2. Pembentukan Serikat Tani Nasional (STN), pada tahun 1993. STN merupakan sebuah wadah perjuangan yang berasal dari kaum tani bersama para aktivis mahasiswa. Program-program STN yang paling prioritas adalah untuk membela hak-hak kaum tani. Selain itu, program-program STN yang lain sekaligus digabungkan dengan upaya memperjuangkan hak-hak politik rakyat, seperti hak untuk berorganisasi, menyatukan pendapat, demonstrasi, dan menentang kekerasan.
3. Pembentukan Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) pada bulan Oktober 1994. PPBI merupakan suatu wadah perjuangan kaum buruh yang berskala nasional. PPBI lahir ketika pemogokan buruh memasuki titik angka tertinggi dalam sejarah Orde Baru sekitar 1.130 kali pada tahun 1994. PPBI mempunyai program yaitu mengenai pemberian upah minimum nasional Rp 7000/hari, kebebasan berserikat bagi kaum buruh, dan menghentikan intervensi militer (ABRI) dalam penyelesaian konflik perburuhan.
4. Pembentukan Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER) pada tahun 1994. Para aktivis mahasiswa saat itu menyadari bahwa perjuangan budaya menjadi penting karena selama puluhan tahun rakyat dibisukan dan didominasi oleh budaya feodalisme dan

budaya ketakutan terhadap Negara. Karena itu, semua budaya yang membuat rakyat pasif dan tidak berinisiatif untuk mengubah nasibnya harus dihilangkan. JAKKER adalah alat yang diorientasikan untuk melakukan pembebasan mental itu. JAKKER yang diketahui oleh Widji Thukul sadar bahwa perlawanan budaya tidak dapat dipisahkan dari perlawanan kaum tertindas secara keseluruhan.

5. Pembentukan Serikat Rakyat Indonesia (SRI) pada tahun 1994. SRI merupakan wadah dari kaum miskin kota untuk memperjuangkan hak-hak mereka, dan juga perlawanan mereka terhadap ketidakadilan ekonomi dan kekerasan tentara. Kalangan kelas ini, dalam pandangan aktivis mahasiswa harus diwadahi dan belajar politik. Ini menjadi penting karena apabila tidak dilakukan, mereka akan dengan mudah dipancing atau diprovokasi untuk mendukung suatu kerusuhan atau anarkisme yang berwatak SARA.

Penyatuan-penyatuan organisasi perlawanan tersebut, bagi mereka harus segera mungkin dilaksanakan agar memberi kekuatan pendorong bagi keterbukaan politik dan penumbangan Orde Baru Soeharto. Dengan menyatukan berbagai kekuatan dari berbagai lokal dan sektor masyarakat, maka diharapkan ruang gerak dan kemampuan untuk membuat ruang demokrasi semakin terbuka. Bersatunya rakyat untuk menuntut perubahan juga penting dalam rangka perjuangan demokrasi saat itu.

Perjuangan melawan kediktatoran Orde Baru tidak dapat diserahkan pada perjuangan elitis dengan mengandalkan konsesi dan kompromi tanpa kontrol dari rakyat. Karena jika kaum elit tidak melibatkan rakyat, dikhawatirkan mereka akan terjebak pada penyelewengan politik terhadap demokrasi yang sejatinya. Menyadari akan hal itu, para aktivis yang sudah terwadahi tersebut, mencoba memasuki arena perjuangan demokrasi dengan watak kerakyatan dan metode aksi massa.

2. Pembentukan Persatuan Rakyat Demokratik

Dalam kurun waktu periode 1994 inilah situasi politik nasional semakin memanas seiring represifnya pemerintahan Orde Baru. Namun di sisi lain, para aktivis gerakan mahasiswa melihat adanya perkembangan dan bahkan kemajuan masyarakat bagi upaya-upaya resistensi terhadap pemerintahan Orde Baru. Bagi para aktivis, periode ini adalah era pembukaan politik. Kemajuan-kemajuan tersebut dapat diuraikan dalam bentuk ;³

1. Sentimen rakyat terhadap kediktatoran Orde Baru mulai meluas.
2. Keberanian rakyat untuk mempertahankan hak-haknya semakin tumbuh.
3. Jaringan dan wadah perlawanan mulai dibentuk di berbagai tempat dan sektor masyarakat.

³ *Ibid.*, h. 20.

4. Watak kerakyatan dalam perlawanan demokratik mulai muncul sebagai pendorong utama untuk memaksakan keterbukaan dengan mulai terangkatnya isu mengenai perburuhan dan tani.
5. Unsur-unsur demokratik dan kerakyatan dalam perlawanan telah mampu berkembang dan berdiri di garda depan, baik dalam skala sektoral maupun wilayah tertentu.

Meski perkembangan masyarakat yang begitu dinamis dan progresif tersebut, para aktivis mahasiswa tersebut masih melihat ada kekurangan fundamental dalam gerakan resistensi terhadap pemerintah Orde Baru. Hal tersebut dinilai mereka karena belum adanya kekuatan oposisi yang mau berdiri di garda terdepan, serta belum adanya wadah politik radikal yang mampu meningkatkan perlawanan massal dalam menumbangkan pemerintahan Orde Baru. Oleh karena itu, para aktivis yang selama periode 1992-1994 yang telah bergerak dan mengorganisir dalam wadah-wadah yang berupa SMID, STN, PPBI, JAKKER, dan SRI memandang perlunya menggabungkan kekuatan organisasi tersebut dalam satu wadah perjuangan bersama. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan daya resistensi yang mungkin lebih besar. Maka pada tanggal 2 Mei 1994 diadakanlah suatu pertemuan diantara elemen-elemen gerakan tersebut. Dalam forum tersebut lalu disepakati untuk mendirikan sebuah organisasi payung dalam rangka

meningkatkan kualitas perlawanan yang dikenal dengan Persatuan Rakyat Demokratik.⁴

Sebagai sebuah payung gerakan bersama, kehadiran Persatuan Rakyat Demokratik mempunyai program-program politik yang perlu diprioritaskan yaitu menuntut dibukanya ruang demokrasi seluas mungkin. Untuk itu Persatuan Rakyat Demokratik menuntut beberapa hal yang diantaranya; Paket 5 UU Politik 1985 dan Dwi Fungsi ABRI harus dicabut, karena keduanya merupakan tiang penyangga pemerintahan Presiden Soeharto.

Paket 5 UU Politik adalah sebuah undang-undang yang mengesahkan bentuk otoriterianisme pemerintahan Orde Baru. Hak-hak rakyat untuk berorganisasi, berkumpul, dan menyatakan pendapat hanya boleh disalurkan melalui wadah yang dikontrol, dibuat, dan diawasi oleh pemerintah. Wadah tunggal organisasi dipraktekan untuk mendukung kesetiaan pada kediktatoran.⁵

Dominasi politik ABRI juga merupakan tulang punggung kekuasaan pemerintah Orde Baru. Dengan kekuasaan territorial dan operasi intelejen berhasil mengontrol serta menundukan rakyat dalam rangka melindungi pemerintah. Di dalam parlemen, ABRI menerima hak-hak khusus untuk memanipulasi fungsi sejati parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat.

⁴ Deklarasi Persatuan Rakyat Demokratik dilakukan tepatnya pada 3 Mei 1994, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Jakarta. Sebagai Ketua adalah Sugeng Bahagio, Sekjen Tumpak Sitorus, Seksi Litbang Andi Arif, Seksi Budaya Widji Thukul, dan Seksi Dana Ambar. Data dikutip dalam Miftahudin, *Radikalisasi Pemuda: PRD Melawan Tirani*, Jakarta: Desantara, 2004, h. 81.

⁵ *Loc.cit.*

Selain itu para aktivis PRD juga mengkritik penyelenggaraan pemilu Orde Baru. Bagi PRD, pemilu merupakan pesta yang dibiayai oleh pemerintah untuk merayakan perpanjangan kekuasaan kediktatoran Orde Baru. Pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali tidak memenuhi watak demokratis, jujur dan adil. Partai-partai politik pun dipandang mereka sebagai mesin yang mendukung otoritarianisme Orde Baru.⁶

Keinginan untuk menyatukan mahasiswa dengan buruh semakin bulat ketika aktivis mahasiswa mendapat inspirasi dari gerakan aliansi buruh-mahasiswa di Korea Selatan. Banyak anggota PRD yang dikirim ke kantong-kantong buruh untuk melakukan pengorganisasian. Upaya menggabungkan aksi buruh dan mahasiswa dalam sebuah aksi bersama yang sudah dirancang akhirnya terealisasi.

Pada saat itu, PRD juga tetap menjalankan apa yang disebut mereka kerja-kerja politik melalui wadah-wadah advokasinya. Pada bulan Januari 1995, SMID dan PPBI melakukan aksi gabungan di halaman pabrik PT Ganda Guna Indonesia. aksi tersebut dilakukan dalam rangka mendukung tuntutan-tuntutan ekonomis kaum buruh. Dalam aksi tersebut, 14 aktivis ditangkap oleh Kodim Tangerang, namun tidak lama dibebaskan.

Pada bulan Maret 1995, Aktivis dari PPBI, SMID, STN bersama para pemuda pejuang Maubere membentuk Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Rakyat Maubere (SPRIM). Para aktivis mahasiswa ini menganggap bahwa problematisasi referendum rakyat Maubere/Timor Timur

⁶ Wawancara dengan Wilson (mantan aktivis SPRIM/PRD), pada Juli 2010, di Jakarta.

dengan perjuangan demokrasi Indonesia merupakan suatu hal yang relevansif. Hal ini karena rakyat Maubere dan rakyat Indonesia menghadapi musuh yang sama, yakni pemerintahan Orde Baru.⁷

SPRIM dibuat sebagai wadah untuk saling mengerti bahwa perjuangan dua bangsa dalam meluaskan tuntutan rakyat Maubere untuk merdeka di kalangan kaum oposisi Indonesia secara luas. SPRIM mengorganisir suatu perlawanan dan propaganda secara terbuka dan terang-terangan kepada kaum oposisi dan pemerintahan Orde Baru sendiri agar melaksanakan referendum di Timor Timur.

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh internasional. Pada masa kepemimpinan Orde Baru adalah hal yang sangat mustahil untuk merayakan hari buruh. Namun pada tanggal 1 Mei 1995, para aktivis PRD yang bergerak melalui wadah SMID dan PPBI mengadakan aksi dalam memperingati Hari Buruh Sedunia di Semarang dan Jakarta. Aksi tersebut merupakan aksi hari buruh pertama setelah 30 tahun dilarang oleh Soeharto. Akhirnya aparat membubarkan demonstran dengan cara represif dan menangkap sekitar 60 mahasiswa dan buruh yang bergabung dalam SMID dan PPBI tersebut.

Pada tanggal 15-23 Juli 1995, para aktivis PRD tersebut melakukan aksi gabungan bersama 15.000 buruh PT GRI di Bogor. Aksi tersebut dipimpin oleh Dita Indah Sari, Budiman Sudjatmiko (basis PPBI) dan Munif Laredo (Ketua Umum SMID saat itu). Aksi buruh tersebut merupakan aksi terbesar dan

⁷ KPP-PRD, *Op.cit.*, h. 32.

teroganisir pada tahun 1995, bahkan Presiden Soeharto pun sampai harus mengeluarkan pernyataan mengenai aksi buruh-mahasiswa tersebut.⁸

Seiring berjalannya perkembangan aksi-aksi advokasi kerakyatan itu, ada satu hal yang masih mengganjal perjuangan para aktivis PRD. Pada saat itu Persatuan Rakyat Demokratik (PRD) merasa bahwa program-program radikal berupa tuntutan yang berwatak demokratik kerakyatan kelompok-kelompok perubahan (mahasiswa, cendekiawan, buruh, tani dan kelompok perubahan lainnya) tidak berfungsi dengan optimal, serta kurang setianya para pengurus PRD (saat itu yang menjabat sebagai ketua PRD adalah Sugeng Bahagio) dalam mengemban amanat kongres PRD, dimana program-program, strategi dan taktik organisasi yang dihasilkan dalam kongres tersebut tidak direalisasikan.

Persatuan Rakyat Demokratik di bawah kepemimpinan Sugeng Bahagio tidak menjalankan peranan dalam membangun sebuah aliansi antikediktatoran bersama kekuatan oposisi elite (dalam situasi ketika oposisi elite tidak bergerak maju), dan tidak melakukan aktivitas politik dalam rangka mendorong maju potensi perlawanan massa rakyat. Padahal saat itu situasi politik makin meningkatnya frekuensi demonstrasi massa rakyat, terutama pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh kaum buruh industri.

Penyimpangan lain juga terbaca dalam resolusi yang dikeluarkan oleh pengurus pusat PRD yang mengubah kesepakatan dalam kongres mengenai arah perjuangan PRD terhadap nasib Timor Timur; dari mendukung hak

⁸ *Log.cit.*

penentuan nasib sendiri dan referendum bagi rakyat Timor Timur, diselewengkan menjadi dukungan terhadap “hak-hak asasi manusia dan hak-hak demokrasi rakyat Timor Timur”.⁹

Melihat penyimpangan dan penyelewengan itu, para aktivis mahasiswa yang menjadi pengurus PRD tersebut merasa terpancang untuk meluruskannya. Para aktivis merasa hal ini sangat prinsipil dan penting karena menyangkut keyakinan dan ketetapan bahwa untuk membebaskan rakyat dari penghisapan dan penindasan dibutuhkan gerakan rakyat yang progresif dan revolusioner sebagaimana juga garis politik PRD yang dicanangkan dalam kongres pendiriannya. Tanpa gerakan rakyat yang bersifat seperti itu, para aktivis memandang sulit untuk mencapai masyarakat modern demokratis yang berkeadilan sosial secara hakiki.¹⁰

Dalam perkembangannya, hal-hal demikianlah yang kemudian mendorong beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang sudah memberikan dukungan politik pada PRD serta para Deklarator kongres untuk mengadakan pergantian kepengurusan (*reshuffle*). Maka dibentuklah Komite Penyelamat Organisasi Partai Rakyat Demokratik (KPO-PRD) yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko. KPO-PRD ini mendapat amanat langsung dari para deklaratoren untuk meluruskan sejarah PRD sesuai dengan amanat kongres.

⁹ FX Rudi Gunawan, *Budiman Sudjatmiko, Menolak Tunduk: Catatan Anak Muda Menentang Tirani*, (Jakarta: Grasindo, 1999), h. 22.

¹⁰ *Ibid.*, h. 23.

Fungsi KPO-PRD berakhir setelah kepengurusan yang ada membentuk sebuah Presidium Sementara Persatuan Rakyat Demokratik (PS-PRD). Tugas PS-PRD yang dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko ini adalah menyelenggarakan sebuah Kongres Luar Biasa (KLB) secepatnya untuk memilih kepemimpinan baru sambil menjalankan program dan strategi serta taktik yang menjadi amanat kongres. Rencana penyelenggaraan KLB kemudian ditetapkan pada April 1996. Budiman segera mempersiapkan kepanitiaannya dengan mengintegrasikan beberapa kader organisasi sebagai pelaksananya. PS PRD lalu merumuskan materi-materi yang akan digunakan untuk acuan KLB sebagai bagian dari rencana konsolidasi.

Dalam diskusi mengenai azas organisasi misalnya, Budiman-lah yang mengusulkan agar azas yang dipakai adalah azas Sosial-Demokrasi-Kerakyatan. Adapun alasan dari Budiman yaitu, karena sebagai bagian dari gerakan kerakyatan yang bertujuan membebaskan rakyat dari penindasan, memperjuangkan demokrasi tidak hanya demokrasi dalam makna formal saja meskipun ada partisipasi rakyat didalamnya. Perjuangan demokrasi harus bermuara pada keadilan sosial. Dan dengan azas tersebut, Budiman yakin PRD akan berjuang untuk membebaskan rakyat dari penindasan sehingga akan terwujudlah masyarakat modern tanpa kaum penindas dan kaum tertindas.¹¹

Di hal lain, pada masa kepemimpinan PRD inilah dinamika politik nasional sedang mengalami pasang, ketika massa di perkotaan mulai

¹¹ Wawancara dengan Wilson (mantan aktivis SPRIM/ PRD), pada September 2010, di Salemba, Jakarta.

melawan tindakan represi militeristik Orde Baru terhadap Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang sekarang menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri. Sentimen yang berkembang meluas pada tuntutan politik menentang kepemimpinan Presiden Soeharto. Hal lain menyebabkan ruang perlawanan politik semakin terbuka. Pada perkembangan tahun 1994 inilah, kaum oposisi lalu mendirikan berbagai ormas dan bahkan partai politik yang tegas menyatakan diri sebagai oposisi pemerintah Orde Baru. Partai politik yang kemudian lahir pada saat itu antara lain Partai Uni Demokrasi Indonesia (PUDI) pimpinan Sri Bintang Pamungkas, Masyumi Baru Pimpinan Ridwan Saidi, dan PNI-Supeni pimpinan Ny. Supeni.

Menyikapi semua dinamika politik yang semakin terbuka tersebut, PS-PRD merasa perlu untuk mengubah bentuk organisasinya menjadi suatu partai politik murni yang siap bertarung dalam arena politik nasional. Selanjutnya partai politik yang diwacanakan tersebut diharapkan akan menjadi sekolah politik bagi rakyat untuk membuka ruang demokrasi seluas-luasnya.

Dalam kesibukan kerja-kerja organisasi tersebut, aktivis yang tergabung dalam PS-PRD juga sempat melakukan aksi-aksi melalui wadah-wadah advokasinya. Dalam tahun 1995 tercatat ada beberapa aksi yang dilakukannya, diantaranya yaitu pada tanggal 12 November, para aktivis SPRIM (*onderbouw* PRD) mengadakan aksi memperingati tragedi represifitas dan penindasan oleh ABRI terhadap Santa Cruz pada tahun 1991 di Universitas Indonesia. Aksi ini

dihadiri juga oleh beberapa korban represi yang selamat. Pada tanggal 7 Desember ratusan pemuda Timor-Timur dan PS-PRD mengadakan aksi pendudukan di Kedutaan Belanda dan Rusia. Ini aksi pertama untuk membuktikan bahwa para pejuang demokrasi di Indonesia juga mendukung referendum di Timor-Timur.

Selanjutnya pada tanggal 11 Desember 14.000 buruh PT Sritex di Solo yang dimiliki oleh Ibu Tien dan Harmoko mengadakan pemogokan dipimpin langsung oleh Dita Sari (PPBI) dan Budiman Sudjatmiko (PS-PRD). Keduanya ditangkap oleh aparat militer setempat bersama puluhan aktivis lainnya. Wiji Thukul yang seorang pimpinan Jakker (organ afiliasi PRD) dipukul popor senjata mata kirinya hingga mengalami kebutaan oleh aparat keamanan yang menghadang aksi tersebut.

3. Pendeklarasian Partai Rakyat Demokratik

Pada bulan Mei 1996, diadakanlah Kongres I pendirian Partai Rakyat Demokratik (PRD) di Sleman, Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh ratusan delegasi yang mewakili berbagai ormas sektoral, serta peninjau (observer) dari CNRM dan *Democratic Social Party* (DSP, Partai Sosial Demokrat) Australia. Kongres pertama mengambil beberapa keputusan penting dalam hal program-program, strategi-taktik perjuangan, organisasi, AD/ART partai, slogan dan memilih kepengurusan pusat. Inti semua dari keputusan Kongres I disimpulkan dalam “Manifesto PRD”, yang dibacakan sebagai Deklarasi

Partai Rakyat Demokratik di gedung YLBHI Jakarta pada 22 Juli 1996.

Adapun isi dari pembukaan Manifesto PRD adalah:

Tidak ada demokrasi di Indonesia. demokrasi dalam makna kedaulatan rakyat adalah prinsip dasar dan landasan bagi pembentukan suatu kekuasaan Negara. Selama kedaulatan rakyat masih belum mendapatkan tempat yang layak dalam kehidupan ekonomi, politik dan budaya sebuah bangsa dan masyarakat, selama itu pula sejarah akan memberikan alat-alat perlawanan untuk menegakannya.¹²

Partai Rakyat Demokratik (PRD) memandang penting, dimasa depan, untuk membangun suatu masyarakat sipil modern yang menghormati kedaulatan rakyat dan membenahan praktek demokrasi dengan *Trias Politica*-nya secara sejati, sepuh-penuhnya, sesetia-setianya. Pembangunan demokrasi sejati, sepuh-penuhnya, sesetia-setianya juga haruslah diabdikan pada kedaulatan rakyat. Untuk itu harus dibentuk pemerintah koalisi demokratik kerakyatan sebagai tempat untuk menyalurkan partisipasi rakyat dengan saling menghormati aliran ideologi dan alat-alat politik masing-masing secara damai dan tanpa kekerasan. Maka PRD memandang bahwa partai-lah yang merupakan suatu wadah organisasi yang akan lebih serius mawadahi kepentingan-kepentingan sektor masyarakat.¹³

Dalam kongres luar biasa tersebut, dirumuskan pula program-program partai yang menyangkut ideologi, organisasi dan politik. Landasan program PRD adalah realitas sejarah Indonesia yang memang tidak bisa disetarakan, dipararelkan, dengan masyarakat Rusia, Cina, Amerika Latin, Filipina dan

¹² Pidato pembukaan Manifesto PRD, dalam KPP-PRD, *Op.cit.*, h.22

¹³ Manifesto Partai Rakyat Demokratik.

Eropa pada masa-masa revolusi. Karena, dilihat dari produksi masyarakat, masyarakat Indonesia sekarang tidak memberikan pemaknaan lagi terhadap masalah pertentangan (kontradiksi) antara kaum tani dengan kaum feodal sebab sebagian besar kaum tani hanya menjadi petani gurem dengan petak kecil tanah, walaupun jika dilihat dari problem politik dan budayanya, masih tersisa benih feodalisme.¹⁴

Kongres juga memandang penting bahwa ideologi perlu dirumuskan karena dalam masyarakat yang kapitalistik, perjuangan demokrasi akan berhadapan dengan ideologi kaum kapitalis. Potensi bahaya ideologis yang paling dekat adalah kesadaran palsu rakyat untuk secara sukarela menerima kekuasaan kaum penghisap/penindasnya. Dengan demikian, program ideologi harus berhasil dicapai agar rakyat bisa membebaskan diri dari kesadaran palsu mereka, untuk kemudian meraih kesadaran demokratiknya. Ideologi juga penting sebagai pemandu bagi aksi-aksi melawan penindasan beserta alat-alat politiknya.

Pada masa pendeklarasian PRD, tercatat ada beberapa aksi-aksi advokasi yang juga dilakukan oleh para aktivisnya, misalnya pada bulan Juni 1996 Sekitar 3000 buruh PT Indoshoes mengadakan aksi di DPR RI dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko (Ketum PRD) dan Dita Indah Sari (PPBI),

Selanjutnya pada tanggal 8 Juli diadakan aksi buruh gabungan 10 pabrik di Tandes, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 20 ribu buruh bergabung dalam aksi yang

¹⁴ Wawancara dengan I Gusti Anom Astika (Departemen Propaganda PRD periode 1996-1999), pada Juli 2010, di STF Driyarkara, Jakarta. Beliau lah yang paling banyak kontribusi dalam lahirnya pemikiran-pemikiran PRD yang tertuang dalam manifesto PRD.

dipimpin oleh Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari (PPBI) tersebut. Puluhan aktivis ditangkap, tapi hanya tiga orang yang kemudian dikenakan pasal subversif dan dipenjarakan yaitu Dita Indah Sari, Coen Husen Pontoh dan Moh. Sholeh.¹⁵

Dalam kongres yang membahas mengenai penyusunan program dan strategi PRD, diputuskan pula kepengurusan PRD di bawah pimpinan Ketua Umum Budiman Sudjatmiko dan Sekretaris Jenderal Petrus H. Harianto. Namun kepengurusan ini tidak dapat berumur panjang, karena pada tanggal 27 Juli 1996, tentara melakukan suatu operasi penyerbuan untuk merebut kantor DPP PDI Megawati di jalan Diponegoro Jakarta. Penyerbuan ini selain memakan korban jiwa juga memancing kerusuhan massa. Gedung-gedung pemerintahan, bank, mobil, pom bensin dan sarana publik lainnya dirusak dan dibakar oleh massa sebagai ekspresi kemarahan atas represifitas tentara.

Pada tanggal 29 Juli 1996, pemerintah Orde Baru langsung mengecam dan menuduh PRD sebagai dalang kerusuhan massa tersebut. Seluruh pengurus dan anggota PRD lalu diburu dan difitnah walau tak pernah terbukti dalam pengadilan. Kemudian mereka ditangkap dan diadili dengan pidana *subversif*. Penjelasan lebih lengkap mengenai peristiwa 27 Juli ini akan dibahas pada bab selanjutnya.

B. Program dan Strategi Perjuangan PRD

Eksistensi Partai Rakyat Demokratik merepresentasikan fenomena baru. PRD muncul tidak hanya sekedar menuntut keadilan sosial dan

¹⁵ KPP-PRD, *Op.cit.*, h. 33.

demokrasi sebagai bentuk perhatian dari para aktivis mahasiswa, kaum intelektual, tokoh-tokoh politik, dan kalangan professional lainnya, tetapi PRD muncul dari dialektisasi gerakan-gerakan solidaritas sosial yang tumbuh dan berkembang sejak tahun 1980-an akhir. Mahasiswa dan intelektual yang aktif dalam gerakan solidaritas dan advokasi terhadap rakyat kecil di berbagai daerah bergabung dengan massa buruh dan tani untuk mendeklarasikan apa yang disebut embrio partai politik dengan basis organisasi massa yang *genuine*.

Dasar kemunculan proyek seperti PRD ini merupakan kebangkitan kaum buruh pabrik dan hasil perjuangan politik sejak pertengahan tahun 1980-an. Pemahaman yang baik terhadap sebab, sifat, dan juga pengaruh dari meningkatnya aktivitas industri pada masa Orde Baru juga diperlukan untuk memahami segi-segi yang penting dari situasi sosial dan politik secara umum.

Oleh karena itu, sejak pendeklarasiannya, PRD mencetuskan program-program perjuangan yang orientasinya membimbing dan mendidik kaum buruh, tani, dan elemen massa rakyat lainnya agar mampu berjuang bersama mencapai demokrasi multipartai kerakyatan. Sebuah demokrasi yang bukan dalam makna formal saja, melainkan demokrasi yang sejatinya mampu menciptakan tatanan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial. Berikut adalah beberapa program perjuangan PRD :¹⁶

¹⁶ Sumber penulisan mengenai program-program Perjuangan Partai Rakyat Demokratik diambil buku, *Demi Demokrasi, Partai Rakyat Demokratik (PRD) Menolak Takluk*, yang diterbitkan oleh KPP-PRD, 1999.

1. Program Partai Rakyat Demokratik (PRD)

Program perjuangan merupakan rumusan sasaran yang harus dicapai dalam oleh suatu organisasi kemasyarakatan. Pendasarannya atas basis kebutuhan realitas objektif untuk memecahkan kontradiksi-kontradiksi dalam struktur masyarakat. Karenanya, PRD memandang dalam penyusunan program-program perjuangan merupakan perumusan titik kontradiksi yang mendesak harus diselesaikan, dan apabila tidak diselesaikan maka tidak akan melahirkan perubahan syarat-syarat material perjuangan rakyat sehingga semakin kecil kemungkinan bagi tahap perjuangan rakyat untuk berlanjut ke tahap yang lebih tinggi lagi.

Namun bagi PRD, tahap perjuangan rakyat bukan berarti sebagai tahapan perjuangan ekonomi menuju tahapan perjuangan politik. Hal tersebut diyakini akan membawa menjerumuskan perjuangan pada hal-hal yang bersifat ekonomistik. Untuk menggalang kekuatan rakyat dan menegakan demokrasi, maka yang harus dipenuhi dan dilindungi yaitu adalah hak-hak dasar rakyat secara penuh. Rakyat juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai alat perjuangannya agar mampu memperjuangkan kepentingannya.

Dengan demikian bagi PRD, Program-program perjuangan yang diturunkan kepada massa harus secara ekonomi politik, realitas objektif sejarah, sedapat mungkin seluas-luasnya. Selain itu diperlukan sebuah tatanan

demokratik untuk menggalng kekuatan rakyat yaitu sebuah Pemerintahan Persatuan Demokratik.

Program ideologi, program politik, dan program organisasi serta program ekonomi adalah beberapa program yang mendesak karena menurut para aktivis PRD merupakan penjabaran/akomodasi/pengelompokan titik kontradiksi perjuangan rakyat dalam mencapai demokrasi sejati serta mewujudkan pemerintahan demokratis dibawah kedaulatan rakyat¹⁷. Mengenai penjabarannya akan dijelaskan dibawah ;

Program Ideologi. Program ideologi dirumuskan karena dalam masyarakat Indonesia yang kapitalistik, akan berhadapan dengan ideologi kaum penghisap/penindas (dalam bahasa PRD) yang mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia. Potensi yang paling berbahaya bagi rakyat adalah kesadaran palsu menerima kekuasaan kaum penghisap/penindas. Dengan demikian program ideologi harus dicapai agar rakyat bisa terbebas dari kesadaran palsu. Dengan kesadaran kerakyatan, maka rakyat akan melihat posisi objektifnya sebagai unsur pengemban misi sejarah dalam merebut kekuasaan dan mencapai pemerintahan demokratik. Program-program menjadi prioritas antara lain :

1. Mempropagandakan teori-teori progresif,
2. Mempropagandakan sejarah gerakan massa demokratik kerakyatan,

¹⁷ Wawancara dengan Dominggus (Pengurus KPP-PRD Jakarta), pada Maret 2011, di KPP-PRD, Tebet, Jak-Sel.

3. Menerbitkan selebaran, pamflet, poster sebagai media agitasi dan propaganda dalam kampanye massa organisasi, baik di level masing-masing sektor maupun lintas sektoral.

Program Politik. Program politik merupakan penetapan sasaran tindakan yang harus dicapai rakyat guna menuju masyarakat yang demokratik secara ekonomi, politik, dan budaya. Menurut para aktivis PRD, perjuangan politik harus diupayakan agar mampu mendirikan Negara koalisi demokratik kerakyatan, dan menggantikan kaum penghisap/penindas dengan segala aparat kekerasaanya (tentara, pengadilan, dan penjara).¹⁸ Di hal lain, dengan program politik, maka rakyat mampu mengenali kelompok-kelompok mana yang secara ekonomi-politik memiliki kepentingan akan perubahan demokratik, sehingga bisa menjadi sekutu-sekutu yang harus dirangkul dalam setiap tahapan perjuangan rakyat yang dilaluinya. Program-program politik yang menjadi prioritas PRD antara lain :

1. Menjadi front persatuan radikal-militan-kerakyatan-pelopor-profesional
2. Mencari kesempatan menciptakan/mengembangkan representasi spektrum kerakyatan dalam meraih kepeloporan kepemimpinan politik.
3. Memanfaatkan peluang pemilu untuk berhadapan dengan massa dan melakukan kampanye-kampanye politik untuk mencabut paket 5 UU Politik tahun 1985, UU Kepartaian, UU Keormasan,

¹⁸ Wawancara dengan Agus 'Jabo' (eks-SMID), pada Maret 2011, di KPP-PRD, Tebet, Jak-Sel.

UU Pemilu, UU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR serta UU Referendum.

4. Mendorong/membantu proses demokratisasi hingga mencapai/membantu proses pengembangan kekuatan rakyat.
5. Mencegah skenario junta militer atau skenario kolaborasi militer dengan sipil.
6. Menuntut pemerintahan koalisi demokratik dengan program-program kerakyatan.
7. Mengisi kecendrungan kerakyatan dalam proses demokratisasi.
8. Membantu pemunculan serikat buruh, organisasi-organisasi massa dan partai alternatif.
9. Membantu penyelenggaraan protes-protes rakyat.

Program Organisasi. Program organisasi menurut aktivis PRD merupakan program yang mendesak. Hal ini karena dalam sejarah sudah banyak pihak yang menjadi oposisi pemerintahan Orde Baru. Namun kelemahannya adalah ketidakmampuan mempersiapkan organisasi partai yang sanggup terus-menerus *menohok* kekuasaan dalam kesatuan pemahaman, kesatuan aksi, dan kesatuan komando. Kesanggupan inilah yang akan menyebabkan organisasi partisan dapat menjadi oposisi masa depan. Dengan demikian satu-satunya alat dan media rakyat dalam perjuangan demokratik adalah Partai Rakyat Demokratik yang berdiri sebagai pemasok kekuatan progresif. Dalam aktivitas organisasional, pembuatan struktur organisasi harus dapat menampung tiga prinsip prioritas antara lain :

1. Membuka ruang agitasi dan propaganda dalam bentuk semakin luasnya penyebaran terbitan organisasi, dan dengan alat-alat media massa lainnya yang dapat menyatukan organisasi dengan rakyat.
2. Menyerukan untuk melakukan protes-protes rakyat dengan aksi-aksi massa.
3. Membuka keanggotaan atau pendirian cabang-cabang yang berwatak demokratik-radikal-kerakyatan.

Program Ekonomi. Pemerintahan koalisi demokratik menurut PRD dituntut menjalankan kebijakan pembangunan ekonomi yang merupakan pembalikan dari kebijakan pembangunan pemerintah Orde Baru, dimana hal ini akan melapangkan jalan bagi pemerintahan koalisi demokratik kerakyatan. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan cara mengontrol sumber daya alam, menentukan program dan kebijakan ekonomi yang bebas dari dominasi modal monopoli internasional dan manipulasi modal monopoli modal domestik. Adapun cerminan dari kebijakan yang tertuang dalam program ekonomi PRD yaitu; Pembangunan industri dan pertanian yang akan mengarah pada pencapaian alih teknologi sebesar-besarnya dan produktivitas secara maksimal, pengembangan IPTEK yang akan diarahkan untuk memperbaiki kapasitas seluruh produksi guna menyediakan kebutuhan-kebutuhan rakyat, mendorong mekanisme kolektif di kalangan rakyat untuk meningkatkan produktivitas perekonomian rakyat, pemilikan sosial terhadap perusahaan-perusahaan yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan rakyat serta

mendukung sektor swasta yang memberikan sumbangan positif bagi pengembangan kapasitas produksi dan sumber daya.

PRD memandang bahwa program-program perjuangan merupakan rumusan sasaran yang harus dicapai. Program-program tersebut didasarkan atas landasan kebutuhan-kebutuhan nyata untuk memecahkan teka-teki sejarah perkembangan perjuangan rakyat yang digerakan oleh kontradiksi-kontradiksi/pertentangan-pertentangan dalam masyarakat. Oleh karena itu program-program perjuangan disusun dalam rangka merumuskan titik-titik kontradiksi-kontradiksi/pertentangan-pertentangan yang harus diselesaikan, agar perjuangan rakyat mengalami kemajuan ke dalam tahapan yang lebih tinggi.¹⁹

2. Strategi Partai Rakyat Demokratik

Demi tercapainya tujuan perjuangan politiknya, maka PRD menggunakan metode *Progresif-Revolutioner* yaitu bahwa PRD memiliki pola orientasi maju dan bersifat mendasar dalam perubahan-perubahan yang mereka tuangkan melalui selebaran, pamflet, poster dan berbagai alat serta media agitasi propaganda lainnya dalam setiap gerakan massa.

Berdasarkan bentuk dan gerakan politik PRD maka sering dilihat bahwa aksi-aksi PRD yang berupa demonstrasi dan berbagai gerakan politik lainnya sering berakhir dengan kekerasan. Hal ini terjadi karena adanya tindakan-tindakan yang mengedepankan kekerasan dan tidak mengenal

¹⁹ KPP-PRD, Op.cit., h. 40.

kompromi (represif) oleh pemerintah Orde Baru terhadap kelompok PRD. PRD memandang tindakan-tindakan pemerintah semacam itu memang harus dilawan karena akan mematikan gerakan-gerakan berpikiran dan berorientasi maju.

Salah satu prinsip dari strategi yang dicanangkan PRD adalah mendasarkan diri pada hukum realitas objektif dan bukan atas dasar keinginan subjektif. Realitas objektif tersebut adalah suatu materi sejarah kapitalisme. Pemerintah Orde Baru telah melahirkan kaum buruh industri-manufaktur dalam jumlah yang signifikan yaitu sekitar 10,5 juta. Jumlah yang besar tersebut harus dipimpin untuk menciptakan situasi politik perlawanan dan menyeret sekutu-sekutu untuk berjuang bersama. Oleh karena itu, PRD memandang bahwa proses dari strategi sebagai kondisi objektif yang harus dimaksimalkan, dengan cara menanggapi kenyataan bahwa aksi-aksi kaum buruh baik yang dipimpin maupun sporadis terus meningkat, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Dalam memimpin perjuangan, tuntutan mendesak yang berupa tuntutan ekonomi kaum buruh, harus dihubungkan dengan perjuangan politik menentang otoritarianisme dan kediktatoran rejim Orde Baru (bahasa PRD). Yakni diantaranya adalah dengan melakukan agitasi tentang tingginya harga, agitasi tentang rendahnya upah, dan agitasi membongkar kampanye rejim yang mengaburkan kontradiksi dalam setiap konflik buruh, agitasi

membongkar setiap intervensi pemerintah mengenai masalah perburuhan,²⁰ agitasi membongkar intervensi tentara dalam urusan perburuhan, agitasi melawan pembatasan hak-hak buruh, 5 Paket UU Politik tahun 1985, serta agitasi tentang tiadanya jaminan terhadap pemilikan tanah bagi penggarap dan teknologi yang rendah di bidang pertanian.

Selain itu, menurut PRD, sektor-sektor masyarakat lain seperti mahasiswa, kaum tani, nelayan dan kaum miskin kota harus dipimpin dan diorganisir. Pendirian organisasi massa dengan jumlah keanggotaan, dengan keluasan basis geografis, dan dengan tingkat kualitas politik tertentu secara otomatis tak akan mampu dibendung oleh pemerintah Orde Baru. Upaya-upaya perlawanan dari basis mahasiswa sepanjang periode akhir 1980-an hingga awal 1990-an membuktikan dan menjadikan identitas kelompok sosial yang memiliki potensi sebagai kelompok prodemokrasi dalam mencapai demokrasi liberal yang sejati.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan politik progresif mulai muncul dan berkembang dari kalangan mahasiswa yang sadar politik, organisasi dan ideologi serta kepeloporan. Dari mereka akan ditransformasikan budaya perlawanan secara profesional ke kalangan buruh, tani, dan elemen masyarakat lainnya.

Secara strategis, struktur dan mekanisme organisasi yang dicanangkan PRD harus diterapkan sedinamis mungkin dan diarahkan dengan gerak jalur sejarah, sesuai dengan gerak aspek-aspek geografis dan sektor yang aktif

²⁰ Contoh bentuk intervensi Negara dalam masalah perburuhan adalah SPSI yang merupakan kepanjangan tangan Departemen Ketenagakerjaan.

melawan. Artinya bahwa fungsi pimpinan ideologi/politik/organisasi telah waktunya untuk memimpin gerakan massa demokratik guna mendorong kepemimpinan kekuatan demokratik-progresif-kerakyatan di tengah-tengah tunas kebangkitan gerakan massa melawan penghisapan/penindasan.

Dengan begitu, tugas agitasi-propaganda akan menjadi semakin mendesak untuk dilancarkan, karena mengingat bahwa selama ini gerakan massa demokratik yang didalamnya termasuk perjuangan kaum buruh masih belum terpimpin dan terorganisir. Dukungan-dukungan penuh terhadap bentuk-bentuk perjuangan massa dengan begitu sangat perlu dibutuhkan, bersamaan dengan gerakan demokratik-progresif-kerakyatan yang lebih maju lagi.

Walaupun telah disinggung bahwa konsentrasi kerja PRD ada pada kaum buruh industri manufaktur, mahasiswa, kaum tani dan rakyat miskin kota, akan tetapi disisi lain PRD tetap menyokong kaum demokrat-progresif-kerakyatan lain yang juga siap melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Orde Baru. Dukungan-dukungan tersebut secara konsisten terus dilancarkan dalam rangka mempercepat tumbuhnya perlawanan politik rakyat.

Dalam melakukan perjuangan demokratik di tengah kelompok oposisi lainnya, PRD tetap konsisten menunjukkan dan membuktikan bahwa dengan perjuangan massa demokratik. Hal ini bagi PRD merupakan satu-satunya jalan untuk menghasilkan demokrasi yang sepenuh-penuhnya sebagai syarat pembebasan rakyat.

Dengan demikian tugas PRD yang paling mendesak atau prioritas adalah untuk mendorong terus kesadaran dan tindakan politik progresif dikalangan massa terutama kaum buruh. Hal ini akan menuntut kerja-kerja agitasi-propaganda dan organisasi dengan cara-cara pembentukan agen-agen pergerakan melalui selebaran Koran.²¹ Sehingga adalah tepat sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa tidak bisa mengukur keberhasilan dari organisasi, tanpa membicarakan seberapa banyak tiras terbitan-terbitannya telah dicetak dan seberapa jauh didistribusikan. Secara ringkas, sebuah selebaran Koran atau segala jenis terbitan organisasi yang akan diterbitkan dan menjadi salah satu strategi PRD akan memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Analisis ekonomi politik : Tepatnya analisa masyarakat Indonesia dan perlawanan rakyat yang bisa menjelaskan bagaimana perkembangan kapitalisme dan hubungan-hubungan penindasan dalam masyarakat Indonesia pada periode tertentu. Misalnya saja; diuraikan tentang sebab-musabab asal-muasal keberadaan kaum penindas, serta konsekuensi di masa mendatang bila ada atau tidak perjuangan politik rakyat, atau lebih detail lagi tentang konsekuensi dari sebuah peraturan pemerintah maupun undang-undang yang mengatur perekonomian dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kaum buruh dan rakyat secara keseluruhan.
2. Analisis situasi politik nasional : Menguraikan tentang hubungan-hubungan politik yang terjadi dalam konstelasi politik nasional.

²¹ Wawancara dengan I Gusti Anom Astika (Departemen Propaganda PRD periode 1996-1999), pada Juli 2010, di STF Driyarkara, Jakarta.

Peristiwa-peristiwa politik pemerintahan, legislatif, dan yudikatif. Harus dijelaskan pula posisi politik dan tahap politik perjuangan rakyat, serta peluang-peluang politik yang harus diambil. Dengan analisis terhadap situasi politik nasional yang terus berkembang memungkinkan untuk merumuskan tuntutan-tuntutan secara kongkret dan relevan.

3. Analisis tidakan taktik, organisasi, dan slogan semboyan : Hal ini akan memberikan arahan kepada para agen maupun pembaca selebaran tentang tindakan-tindakan yang akan diambil.

Menurut para aktivis PRD, semua hal mengenai program-program dan strategi PRD hanya mampu diwujudkan melalui organisasi-organisasi rakyat yang bebas. Dengan demikian secara bersama-sama rakyat akan memperkuat untuk menegakan kepentingan-kepentingannya yang terwujud dalam mobilisasi aksi-aksi mereka. Hanya sebuah tatanan yang bersifat demokratik lah yang akan menjamin tergalangnya kekuatan rakyat, dan tatanan demokratik tersebut hanya bisa dilembagakan melalui sebuah Pemerintah Persatuan Demokratik.²²

²² KPP-PRD, *Op.cit.*, h. 41.